



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 9181-9191

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan 10 provinsi di indonesia ditinjau dari perspektif ekonomi islam tahun 2020-2024

Halimatul Aspiyah¹, Budimansyah², Taufiqur Rahman³

^{1, 2, 3} Ekonomi syariah, Fakultas ekonomi dan bisnis islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
¹halimatulaspiyah@gmail.com ²budi@radenintan.ac.id ³taufiqur@radenintan.ac.id

Abstrak

Hambatan utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya di daerah-daerah dengan kesenjangan pendapatan paling parah, adalah masalah struktural ketidaksetaraan pendapatan. Ketidaksetaraan akibat pemulihan ekonomi yang tidak merata telah menjadi perhatian yang lebih besar selama dan setelah pandemi COVID-19. Dari sudut pandang ekonomi Islam, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruhnya pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, dan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di sepuluh provinsi di Indonesia yang menunjukkan tingkat ketidaksetaraan tertinggi di tahun 2024. Analisis regresi data panel adalah alat yang dipilih untuk studi kuantitatif ini. Dengan menggunakan strategi pengambilan sampel bertujuan, data sekunder diperoleh dari Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Model Efek Acak (REM) muncul sebagai pemenang dalam penelitian ini setelah melalui pengujian ketat oleh Chow dan Hausman. Berdasarkan data, kita dapat melihat bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi secara signifikan memengaruhi kesenjangan pendapatan, tetapi pengeluaran pemerintah dan pembangunan ekonomi memiliki pengaruh positif tetapi dapat diabaikan. Kesenjangan pendapatan dipengaruhi secara positif tetapi tidak signifikan oleh pertumbuhan PDB, pengeluaran pemerintah, dan pencapaian pendidikan secara keseluruhan. Faktor-faktor independen masih memiliki kapasitas terbatas untuk menjelaskan fluktuasi ketidaksetaraan pendapatan, seperti yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi. Temuan ini menyoroti perlunya optimalisasi kebijakan publik, terutama di sektor pendidikan, dari sudut pandang ekonomi Islam, untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih adil dan merata, karena pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan distributif.

Kata kunci: Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pendidikan, Ekonomi Islam

1. Latar Belakang

Ketimpangan pendapatan adalah masalah jangka panjang yang menghambat pertumbuhan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Ketika terjadi kesenjangan dalam distribusi pendapatan, hanya sebagian kecil masyarakat yang mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebut ketidaksetaraan pendapatan. Kondisi ini dapat memicu berbagai permasalahan sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya kemiskinan, ketidakadilan sosial, serta ketidakstabilan ekonomi dan politik, sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kebijakan (Al Aqilah, Muchtar, and Robinson Sihombing 2024). Menurut pandangan Marx, redistribusi kekayaan yang adil hanya dapat dicapai melalui transisi dari kapitalisme ke sosialisme. Dengan demikian, ketimpangan pendapatan merupakan situasi di mana pembagian penghasilan di kalangan masyarakat tidak merata (Sidauruk et al. 2024). Terdapat kesenjangan regional yang besar dalam ketidaksetaraan pendapatan yang masih tinggi di Indonesia. Kesenjangan ini tidak hanya terjadi antara kelompok pendapatan tertinggi dan terendah, tetapi juga terjadi di berbagai provinsi. Kesenjangan dalam sumber daya ekonomi, infrastruktur, dan peluang kerja memperparah kesenjangan kesejahteraan sosial antara daerah maju dan daerah terbelakang, yang merupakan akibat langsung dari kesenjangan pembangunan. (Ulfa and Wiweko 2022). Untuk mengukur ketimpangan pendapatan, Badan Pusat Statistik menggunakan koefisien Gini yang didasarkan pada pengeluaran rumah tangga, karena data pengeluaran dianggap lebih merepresentasikan kemampuan ekonomi masyarakat dibandingkan pendapatan yang sering kali sulit diungkapkan secara akurat (Chayyani 2021). Apabila pelaku ekonomi sudah terbiasa maka krisisnya ekonomi sudah pasti melanda (mutia maharani, anas malik 2025) Pertumbuhan ekonomi sering dikaitkan dengan dinamika ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas produksi suatu wilayah dalam jangka panjang yang tercermin melalui

Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan 10 provinsi di indonesia ditinjau dari perspektif ekonomi islam tahun 2020-2024

peningkatan Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto per kapita. Menurut Kuznets, pada tahap awal pembangunan ekonomi, pertumbuhan cenderung diiringi oleh peningkatan ketimpangan pendapatan akibat proses industrialisasi dan urbanisasi, sebelum akhirnya menurun pada tahap pembangunan selanjutnya (Khodijah, Kamila, and Muhammad Rizki Siddiq 2022). Dengan demikian, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan tidak bersifat linear dan sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi serta kebijakan yang diterapkan. Selain pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah juga memiliki peran penting dalam memengaruhi distribusi pendapatan. Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan layanan publik dan program kesejahteraan masyarakat. Secara teoritis, peningkatan pengeluaran pemerintah yang efektif dan tepat sasaran dapat mengurangi ketimpangan pendapatan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial (Irsyadul Ibad Abdillah and Novi Primitasari 2023). Namun, apabila pengeluaran pemerintah tidak dialokasikan secara efisien, maka dampaknya terhadap pemerataan pendapatan menjadi terbatas (Agusalim 2021).

Faktor lain yang turut memengaruhi ketimpangan pendapatan adalah tingkat pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai proses strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta memperluas kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih layak. Menurut Azyumardi, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai proses pengajaran, tetapi juga sebagai upaya pengembangan kesadaran dan kapasitas individu agar mampu berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial dan ekonomi (Hidayat, Ag, and Pd 2019). Perbedaan tingkat pendidikan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat berpotensi menciptakan kesenjangan pendapatan yang semakin lebar apabila akses pendidikan tidak merata. Pandemi COVID-19 yang dimulai pada tahun 2020 menyebabkan gejolak ekonomi yang signifikan, seperti penurunan pertumbuhan ekonomi dan terganggunya aktivitas produksi di berbagai daerah. Oleh karena itu, periode penelitian 2020–2024 dipilih karena mencakup fase pandemi hingga pascapandemi, sehingga mampu menggambarkan dampak krisis serta proses pemulihan ekonomi. Periode 2021–2024 merepresentasikan fase pemulihan dengan pola pertumbuhan, efisiensi belanja pemerintah, tingkat pendidikan, dan ketimpangan pendapatan yang berbeda antarprovinsi. Dengan demikian, periode ini dinilai relevan dan representatif untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah terhadap ketimpangan pendapatan (Lestari, Olilingo, and Mopangga 2024). Pemilihan 10 provinsi dilakukan karena provinsi-provinsi tersebut merupakan wilayah dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia pada periode tahun 2024. Dengan fokus pada provinsi yang memiliki Gini Ratio terbesar, penelitian menjadi lebih terarah dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berkontribusi terhadap ketimpangan.

Dalam mengkaji ketimpangan pendapatan, sudut pandang ekonomi Islam menekankan konsep keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan fungsi zakat sebagai alat redistribusi. Ekonomi Islam menekankan gagasan bahwa untuk menjaga keseimbangan dan menghindari ketimpangan yang parah, kekayaan harus didistribusikan secara adil di antara semua lapisan masyarakat, alih-alih dikumpulkan oleh segelintir orang. Ekonomi Islam juga menghindari praktik-praktik tidak adil seperti riba (bunga), yang dapat memperparah ketimpangan ekonomi. (yoga permana 2024) Adapun ayat yang membahas tentang keadilan serta ketimpangan yang seharusnya diberikan dengan orang yang lebih membutuhkan yaitu firman Allah dalam Al-qur'an (QS. Al-Hasyr 59: Ayat 7) :

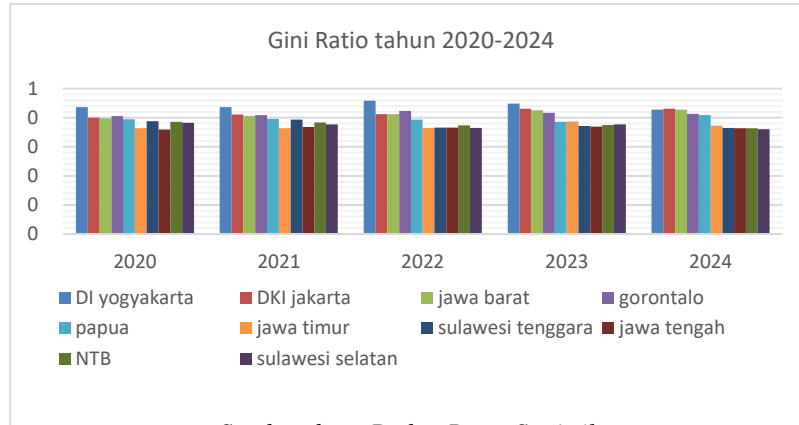
مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّبِيْلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya." (QS. Al-Hasyr 59: Ayat 7)

Surat tersebut menyatakan bahwa rampasan perang atau fai' yang diterima oleh umat Islam tidak sepatutnya hanya beredar di kalangan individu yang berkecukupan semata. Sebaliknya, harta tersebut hendaknya dialokasikan untuk kemaslahatan bersama, khususnya bagi kaum dhuafa, anak piatu, serta individu yang berada dalam kondisi memerlukan. Oleh sebab itu, fungsi pengeluaran pemerintah memiliki urgensi yang signifikan dalam meminimalisir ketimpangan pendapatan, contohnya melalui pengembangan infrastruktur, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta program bantuan sosial yang ditujukan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan

rendah. Dengan demikian, pasal ini mengindikasikan bahwa strategi ekonomi, yang mencakup laju pertumbuhan dan alokasi anggaran negara, perlu dikelola secara cermat agar distribusinya merata, sehingga ketimpangan pendapatan dapat dikurangi dan keadilan sosial dapat tercapai sejalan dengan ajaran Islam.

Ketimpangan pendapatan didalam populasi yang tidak merata antar individu dikenal sebagai ketimpangan pendapatan. Keragaman budaya dan tingkat pembangunan menentukan ketimpangan, yang juga terkait dengan pemerintahan otoriter dan pemerintahan yang mengabaikan hak milik (Deny Irawan, Baiq Saripta Wijimulawiani 2024). Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi ketimpangan pendapatan antarprovinsi, Gambar 1. menampilkan nilai Gini Ratio pada 10 provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia selama periode 2020–2024 sebagai berikut:

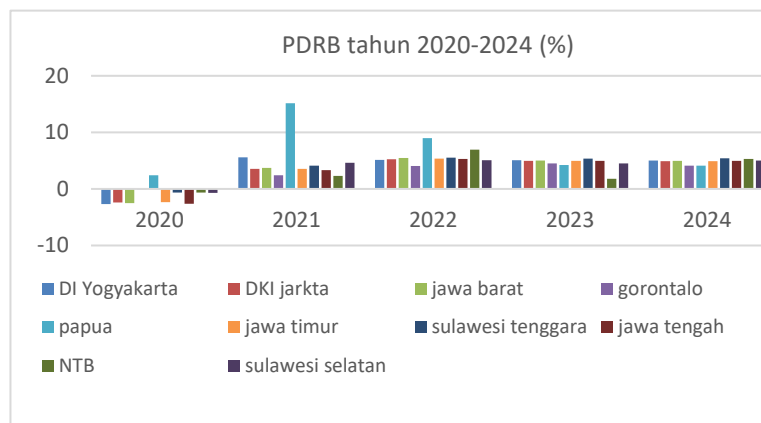


Sumber data: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. grafik ketimpangan pendapatan 10 provinsi di Indonesia tahun 2020-2024

Grafik Gini Ratio pada 10 provinsi di Indonesia mengindikasikan persistensi ketimpangan pendapatan yang substansial dan bervariasi di berbagai wilayah. DKI Jakarta memiliki rasio tertinggi, yaitu sekitar 0,431. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun berfungsi sebagai pusat ekonomi nasional, distribusi hasil pembangunan tidak merata, dengan konsentrasi kekayaan yang signifikan pada segmen berpendapatan tinggi. Situasi serupa teramati di DI Yogyakarta dan Jawa Barat, dengan Gini Ratio masing-masing sekitar 0,428. Di sisi lain, provinsi-provinsi di luar Jawa menghadapi ketidaksetaraan karena adanya keterbatasan dalam pembangunan infrastruktur dasar. Oleh karena itu, kesepuluh provinsi ini memperlihatkan dua aspek dari ketidaksetaraan: wilayah yang berkembang dengan konsentrasi kekayaan yang tinggi dan wilayah yang tertinggal dengan akses ekonomi yang terbatas.

Pertumbuhan ekonomi akan terhambat oleh ketimpangan pendapatan. (IRKANUDIN 2022) Pertumbuhan PDB atau PNB, baik yang lebih tinggi maupun lebih rendah dari tingkat pertumbuhan ekonomi, disebut pertumbuhan ekonomi. Berikut data pertumbuhan ekonomi dari tahun 2020-2024:



Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Gambar 2 grafik pertumbuhan ekonomi 10 provinsi tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik, pertumbuhan ekonomi menunjukkan fluktuasi tajam sepanjang periode 2020–2024. Tahun 2020 menjadi titik terendah akibat pandemi COVID-19 yang menekan hampir seluruh aktivitas ekonomi. Di sisi lain, Papua, yang ekonominya sangat bergantung pada ekspor dan pertambangan, berhasil mencatatkan pertumbuhan positif sekitar 2,39 persen. Sebaliknya, ekonomi provinsi lain—termasuk Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur—terkena dampak parah. Pada tahun 2021, sebagian besar ekonomi provinsi mulai pulih dan meningkat kembali, sementara ekonomi Papua melambat karena fluktuasi harga komoditas. Selain itu, selama periode 2023 hingga 2024, ekonomi sejumlah provinsi cukup stabil di angka 4-5%. Ini termasuk Yogyakarta, Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jakarta. Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Barat termasuk di antara provinsi yang menunjukkan pemulihan yang lebih bertahap. Sebagai contoh variasi regional dalam tingkat pemulihan, Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan tajam hingga 1,80%.

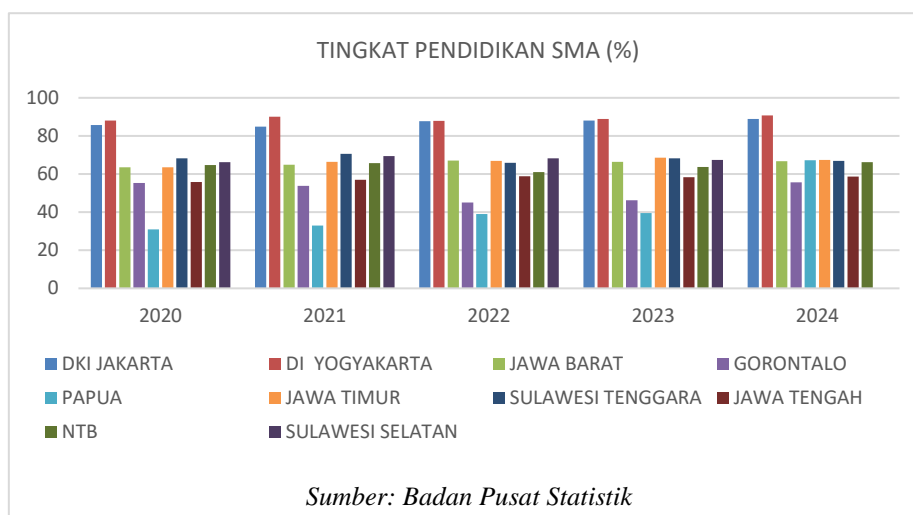
Pengeluaran pemerintah dengan data realisasi belanja, berikut data pengeluaran pemerintah tahun 2020-2024:



Gambar 1.3 grafik pengeluaran pemerintah 10 provinsi tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik diatas pengeluaran pemerintah pada realisasi belanja daerah setiap provinsi cenderung meningkat dari tahun ke tahun, meskipun tingkat pertumbuhannya bervariasi tergantung pada kapasitas fiskal masing-masing provinsi. Belanja daerah melonjak terutama pada tahun-tahun setelah pandemi COVID-19, karena pemerintah daerah berusaha memperbaiki perekonomian dengan membelanjakan lebih banyak uang untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial. Dari sepuluh provinsi dengan ketimpangan pendapatan terbesar, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah memiliki tingkat realisasi belanja daerah tertinggi dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini wajar karena ketiga provinsi tersebut memiliki perekonomian yang lebih kompleks, populasi yang lebih besar, dan kebutuhan pembangunan yang lebih besar. Sementara itu, provinsi di bagian timur Indonesia seperti Papua dan Gorontalo masih memiliki nilai belanja daerah yang relatif lebih rendah, meskipun terus meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) yang membahas tentang pendidikan nasional "Pendidikan adalah upaya yang direncanakan dan sadar untuk menciptakan lingkungan di mana siswa dapat belajar secara aktif. Ini memungkinkan siswa untuk memperoleh kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan untuk diri mereka sendiri, masyarakat, negara, dan dunia." Dalam penelitian ini peneliti mengambil data pada Tingkat Pendidikan jenjang SMA, berikut datanya



Gambar 4. Grafik Tingkat Pendidikan SMA 10 provinsi tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik, tingkat pendidikan jenjang SMA di sepuluh provinsi relatif stabil selama periode 2020–2024, dengan variasi peningkatan yang kecil di beberapa daerah. DKI Jakarta dan DI Yogyakarta secara konsisten mencatat persentase pendidikan SMA tertinggi, berada pada kisaran 80–90%, yang menunjukkan akses pendidikan menengah yang lebih baik. Sebaliknya, Papua memiliki tingkat pendidikan SMA terendah, sekitar 30–40%, mencerminkan masih besarnya ketimpangan pemerataan pendidikan. Provinsi lainnya seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo berada pada kategori menengah dengan persentase 55–70% dan relatif stabil. Secara umum, meskipun terdapat tren peningkatan kecil, kesenjangan pendidikan menengah antarprovinsi masih jelas terlihat, terutama antara wilayah maju dan wilayah timur Indonesia.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan. (Gnangoin et al. 2019) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sementara pada penelitian (Hindun, ady Soejoto 2019) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan. Namun, (Fitriani 2020) Ditemukan bahwa di satu daerah, Aceh, pendidikan tidak secara signifikan memengaruhi kesenjangan kekayaan. Kurangnya konsensus mengenai pengaruh faktor-faktor seperti pertumbuhan PDB, pengeluaran pemerintah, dan pencapaian pendidikan terhadap kesenjangan pendapatan dibuktikan oleh hasil empiris yang kontradiktif ini. Selain itu, daerah-daerah di Indonesia dengan tingkat kesenjangan terburuk belum banyak diteliti dalam penelitian sebelumnya, yang sebagian besar berfokus pada era sebelum pandemi COVID-19. Dengan demikian, tujuan penelitian ekonomi Islam ini adalah untuk meneliti, dari tahun 2020 hingga 2024, dampak pertumbuhan PDB, pengeluaran pemerintah, dan pencapaian pendidikan terhadap kesenjangan pendapatan di sepuluh provinsi paling tidak setara di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji tiga variabel terhadap ketimpangan pendapatan—pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, dan tingkat pendidikan—dengan menggunakan metode kuantitatif melalui analisis regresi data panel. Cita-cita keadilan distributif (al-'adl), pemerataan pembagian manfaat (al-falāh), dan tanggung jawab negara dalam menjaga keseimbangan sosial ditekankan dalam kerangka ekonomi Islam yang menjadi landasan penelitian ini. Menurut teori ekonomi Islam, kesenjangan pendapatan bertentangan dengan tujuan hukum Islam, yaitu melindungi kekayaan (hifz al-māl) dan kesejahteraan masyarakat. Untuk tahun 2020–2024, peneliti menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari panel yang mencakup informasi time series dan cross-sectional (Soesana et al. 2023) Informasi diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan metodologi dokumentasi. Populasi yang mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Menurut (Jailani and Jeka 2023), peneliti dapat menggunakan teknik *purposive sampling* yang bertujuan untuk memilih sampel dari suatu komunitas berdasarkan preferensi peneliti. Studi ini mengidentifikasi sepuluh provinsi di Indonesia yang memiliki ketimpangan pendapatan terbesar pada tahun 2024. Provinsi-provinsi tersebut adalah: DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua, dan Nusa

Tenggara Barat. Ketimpangan pendapatan yang dievaluasi dengan Rasio Gini berfungsi sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Pertumbuhan ekonomi sebagai proporsi PDB daerah, pengeluaran pemerintah sebagai proksi realisasi pengeluaran daerah, dan tingkat pendidikan sebagai persentase penduduk dengan gelar pendidikan menengah semuanya dianggap sebagai variabel independen. Menurut teori ekonomi Islam, pendidikan adalah kunci untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengeluaran pemerintah harus digunakan sebagai alat untuk distribusi yang adil, dan kemajuan ekonomi harus inklusif. Dengan menggunakan EViews 9, peneliti menjalankan angka-angka tersebut melalui analisis regresi data panel. Berikut adalah formulasi model penelitian empiris:

$$KP_{it} = \alpha + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 PP_{it} + \beta_3 PD_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- KP = Ketimpangan Pendapatan
- α = Konstanta
- β_1, β_2 , = Koefisien Variabel Independen
- PE = pertumbuhan ekonomi
- PP = pengeluaran pemerintah
- PD = Tingkat pendidikan
- e = *Error term*
- i = Jumlah 10 Provinsi di Indonesia ketimpangan tertinggi
- t = periode waktu penelitian yaitu dari tahun 2020-2024.

Berdasarkan hasil uji Chow dan Hausman, Random Effects Model/REM ditetapkan sebagai model estimasi yang paling sesuai. Uji t digunakan untuk menyelidiki efek parsial, uji F untuk menyelidiki efek simultan, dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengevaluasi kemampuan model dalam menjelaskan fluktuasi ketidaksetaraan pendapatan. Kemudian, dilakukan pengujian hipotesis.

3. Hasil dan Diskusi

Hasil Analisis

Ketimpangann pendapatan di Indonesia diteliti dalam penelitian ini dengan menggunakan perangkat lunak E-Views 9, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, dan tingkat pendidikan. Sepuluh provinsi dengan kesenjangan terbesar pada tahun 2024 digunakan untuk statistik. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pertumbuhan PDB, pengeluaran pemerintah, dan pencapaian pendidikan memengaruhi kesenjangan pendapatan.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Analisis regresi tidak dapat dimulai sampai Common Effects Model (CEM), Fixed Effects Model (FEM), atau Random Effects Model (REM) ditetapkan sebagai model data panel yang optimal. Saat memilih model, uji Chow dan Hausman digunakan.

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Cross-section F	26.524799	(9,37)	0.0000
Cross-section Chi-square	100.423976	9	0.0000

Sumber : Hasil estimasi pada E-Views 9 (2025)

Hasil uji Chow menunjukkan bahwa FEM adalah model terbaik karena nilai probabilitas chi-square cross-section adalah $0,0000 < 0,05$. Langkah selanjutnya adalah menjalankan FEM dan REM melalui uji Hausman untuk melihat mana yang lebih baik.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Cross-section random	1.946343	3	0.5836
----------------------	----------	---	--------

Sumber : hasil estimasi pada E-Views 9 (2025)

Dari hasil uji hausman diperoleh nilai prob sebesar 0.5836 > 0.05, yang berarti model yang terpilih adalah REM. Dengan demikian, analisis regresi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Random Effect Model (REM)

Analisis Model

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Data Panel Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: KP

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 12/07/25 Time: 07:01

Sample: 2020 2024

Periods included: 5

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 50

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.347694	0.021230	16.37710	0.0000
PE	0.000292	0.000522	0.558244	0.5794
PP	9.37E-11	9.20E-11	1.018753	0.3136
PD	0.000611	0.000277	2.211297	0.0320
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.026486	0.8779
Idiosyncratic random			0.009878	0.1221
Weighted Statistics				
R-squared	0.123388	Mean dependent var		0.064886
Adjusted R-squared	0.066218	S.D. dependent var		0.010105
S.E. of regression	0.009764	Sum squared resid		0.004386
F-statistic	2.158261	Durbin-Watson stat		1.257814
Prob(F-statistic)	0.105808			
Unweighted Statistics				

R-squared	0.094317	Mean dependent var	0.394400
Sum squared resid	0.031063	Durbin-Watson stat	0.177585

Sumber : hasil estimasi pada E-Views 9 (2025)

Berdasarkan hasil estimasi pada uji REM, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$KP = 0.347694005766 + 0.000291602454327*PE + 9.37106655135e-11*PP + 0.000611481836701*PD$$

Jika pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, dan pencapaian pendidikan semuanya diatur ke nol, tingkat ketimpangan pendapatan yang dihasilkan akan menjadi 0,347694, yang mencerminkan tingkat ketidaksetaraan mendasar yang dipengaruhi oleh variabel di luar cakupan model ini. Pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya inklusif, karena koefisien variabel pertumbuhan (0,0002916) menunjukkan bahwa hal itu cenderung memperburuk kesenjangan pendapatan seiring dengan percepatan pertumbuhan. Variabel pengeluaran pemerintah memiliki koefisien positif sebesar 9,37106655, yang menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah masih memberikan pengaruh yang sangat kecil terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga fungsi redistribusi belanja daerah belum optimal. Sementara itu, Koefisien variabel Tingkat pendidikan (PD) sebesar 0,0006115 menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan, yang diprosikan melalui persentase penduduk berpendidikan SMA, cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa akses dan kualitas pendidikan yang belum merata antarwilayah dapat menyebabkan perbedaan kemampuan memperoleh pendapatan, sehingga berkontribusi terhadap meningkatnya ketimpangan.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4. Hasil uji parsial (uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.347694	0.021230	16.37710	0.0000
PE	0.000292	0.000522	0.558244	0.5794
PP	9.37E-11	9.20E-11	1.018753	0.3136
PD	0.000611	0.000277	2.211297	0.0320

Sumber : hasil estimasi pada E-Views 9 (2025)

Pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan disebabkan oleh variabel pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah dalam realisasi pengeluaran daerah, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, yang keduanya memiliki probabilitas lebih besar dari 0,05. Di sepuluh provinsi di seluruh Indonesia, variabel tingkat pendidikan secara signifikan mempengaruhi ketidaksetaraan pendapatan ($p < 0,05$), menunjukkan bahwa variabel tersebut positif dan signifikan.

Uji bersama-sama (uji f)

Tabel 5. Hasil uji f

F-statistic	2.158261
Prob(F-statistic)	0.105808

Sumber : hasil estimasi pada E-Views 9 (2025)

Ketimpangan pendapatan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dalam mewujudkan belanja daerah, atau tingkat pendidikan di sepuluh provinsi Indonesia, menurut hasil uji *f* yang disebutkan di atas (dengan probabilitas >0,05).

Koefisien determinasi (R²)

Tabel 6. Hasil uji koefisien determinasi (R²)

R-squared	0.123388
Adjusted R-squared	0.066218

Sumber : hasil estimasi pada E-Views 9 (2025)

Nilai R-squared sebesar 0,123388 dalam uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa model regresi data panel hanya mampu menjelaskan sekitar 12,33% varians perubahan ketidaksetaraan pendapatan. Sisanya, 87,67%, dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar cakupan penelitian, menurut hasil tabel di atas. Setelah memperhitungkan jumlah variabel dan observasi, kapasitas model untuk menjelaskan variabel dependen berkurang, hanya sekitar 6,62 persen yang masih dipertahankan, sebagaimana dikonfirmasi oleh nilai Adjusted R-squared yang lebih rendah yaitu 0,066218. Pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah untuk belanja daerah, dan tingkat pendidikan sekolah menengah atas terbukti memiliki dampak yang sangat kecil terhadap kesenjangan pendapatan pada tahun 2020–2024 dan 10 provinsi teratas untuk ketidaksetaraan pendapatan, menurut penelitian ini.

Pembahasan

1) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dengan menggunakan Model Efek Acak (Random Effects Model/REM) untuk estimasi regresi data panel, kami menemukan bahwa antara tahun 2020 dan 2024, pembangunan ekonomi memiliki pengaruh positif tetapi kecil terhadap ketidaksetaraan pendapatan di sepuluh provinsi Indonesia yang memiliki tingkat kesenjangan terbesar. Temuan ini membantah hipotesis bahwa pembangunan ekonomi yang lebih cepat telah mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata di 10 provinsi tersebut. Jelas dari data bahwa tidak semua orang di masyarakat telah memetik keuntungan dari ekspansi ekonomi baru-baru ini karena masih bersifat agregat dan tidak inklusif. Karakteristik periode penelitian, yang mencakup pandemi COVID-19 dan era pasca-pandemi, juga dapat menjelaskan pengaruh minimal pertumbuhan ekonomi terhadap kesenjangan pendapatan. Selama periode ini, berbagai daerah dan industri mengalami tingkat pemulihan ekonomi yang berbeda-beda. Sementara sektor-sektor dengan intensitas modal tinggi mengalami pemulihan yang lebih cepat, kelompok berpendapatan rendah dan sektor informal terus menghadapi hambatan terhadap peluang ekonomi. Ketidaksetaraan pendapatan tetap relatif tinggi meskipun terjadi peningkatan pembangunan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan hipotesis Kuznets, yang menyatakan bahwa kesenjangan pendapatan cenderung meningkat pada tahap awal pembangunan ekonomi dan kemudian menurun pada tahap selanjutnya. Menurut teori ekonomi Islam, temuan ini menunjukkan bahwa konsep keadilan distributif (al-'adl) tidak diterapkan secara optimal ketika kemajuan ekonomi belum mengurangi kesenjangan pendapatan. Menurut teori ini, pertumbuhan seharusnya bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

2) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Pendapatan

Menurut kesimpulan studi tersebut, ketimpangan pendapatan dipengaruhi secara positif tetapi tidak signifikan oleh pengeluaran pemerintah, sebagaimana dievaluasi berdasarkan realisasi pengeluaran regional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di 10 provinsi yang dipertimbangkan, peningkatan pengeluaran oleh pemerintah daerah tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk mendistribusikan kembali pendapatan. Sederhananya, tidak ada penurunan yang nyata dalam kesenjangan pendapatan terlepas dari besarnya alokasi pengeluaran regional. Dengan mendanai layanan publik, membangun infrastruktur, sekolah, rumah sakit, dan program jaminan sosial, pemerintah secara teoritis dapat memainkan peran strategis dalam menurunkan kesenjangan ekonomi. Kualitas dan komposisi pengeluaran, bukan hanya kuantitasnya, adalah penentu efektivitas pengeluaran regional, menurut temuan studi ini. Dampaknya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah sangat kecil karena pengeluaran rutin dan operasional, seperti pengeluaran staf, mendominasi. Kesimpulan ini sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam Teori Peacock dan Wiseman, yang menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah, terutama pada masa krisis, mungkin tidak selalu mengarah pada peningkatan kesejahteraan yang lebih merata. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sebagai alat untuk keadilan sosial tidak sepenuhnya sesuai dengan

norma-norma maqasid syariah, termasuk *hifz al-mal* (menjaga kekayaan), sebagaimana digarisbawahi dalam QS, menurut sudut pandang ekonomi Islam. Kekayaan tidak boleh hanya tetap berada di tangan orang kaya saja, sesuai dengan ayat 7 Al-Hasyr.

3) Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan

Di sepuluh provinsi di seluruh Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024, temuan estimasi REM mengungkapkan bahwa kesenjangan pendapatan secara signifikan dan positif dipengaruhi oleh tingkat pendidikan sekolah menengah atas, bukan oleh pembangunan ekonomi dan pengeluaran pemerintah. Temuan ini memperkuat gagasan bahwa pencapaian pendidikan merupakan komponen struktural mendasar dalam dinamika ketidaksetaraan pendapatan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dikaitkan dengan peningkatan kesempatan kerja, produktivitas di tempat kerja, dan kualitas sumber daya manusia yang lebih tinggi. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dikaitkan dengan keamanan ekonomi yang lebih besar dan lebih banyak peluang untuk mobilitas sosial ke atas, yang keduanya memiliki kemampuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan yang ada. Teori modal manusia menyatakan bahwa pendidikan adalah alat yang ampuh untuk mencapai kesetaraan ekonomi dalam jangka panjang, dan hasil ini memperkuat klaim tersebut. Karena hubungannya yang erat dengan gagasan *hifz al-'aql* (menjaga akal sehat), pendidikan memiliki peran penting dalam ekonomi Islam. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam meliputi keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat jangka panjang, dan akses yang adil terhadap pendidikan, yang semuanya memengaruhi pertumbuhan PDB.

4) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, dan Tingkat Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memandang kesenjangan pendapatan sebagai masalah distribusi yang menyentuh tujuan maqasid syariah, khususnya dalam melindungi kekayaan (*hifz al-mal*) dan akal (*hifz al-'aql*), serta konsep keadilan (*al-'adl*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan pembangunan ekonomi belum mengurangi kesenjangan pendapatan, yang menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut belum disalurkan secara memadai ke dalam langkah-langkah untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata. Pembangunan ekonomi dalam ekonomi Islam bukan hanya tentang peningkatan produksi; tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap orang dalam masyarakat mendapat manfaat darinya. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan kesetaraan merupakan pelanggaran terhadap keadilan sosial. Demikian pula, pengeluaran pemerintah seharusnya berfungsi sebagai instrumen redistribusi melalui penyediaan layanan publik dan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat lemah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 bahwa harta tidak boleh beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Sementara itu, tingkat pendidikan terbukti berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menempatkan pendidikan sebagai sarana menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan membuka akses terhadap kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih layak, sehingga berperan penting dalam menciptakan keadilan distributif dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, dalam perspektif ekonomi Islam, pengurangan ketimpangan pendapatan tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan belanja pemerintah, tetapi memerlukan kebijakan pendidikan yang merata serta pengelolaan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan umat.

5) Pembahasan Hasil f dan Koefisien Determinasi

Menurut hasil uji F, tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara kesenjangan pendapatan dan pertumbuhan PDB, pengeluaran pemerintah, atau tingkat pendidikan. Selain itu, variabel model penelitian hanya dapat menjelaskan sebagian kecil varians dalam ketidaksetaraan pendapatan di 10 provinsi yang diteliti, sebagaimana ditunjukkan oleh koefisien determinasi (R^2) yang relatif rendah. Berdasarkan temuan ini, kesenjangan pendapatan adalah masalah multifaset dengan banyak penyebab di luar perubahan ekonomi, pengeluaran publik, dan pencapaian pendidikan. Dari sudut pandang ekonomi Islam, situasi ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan strategi yang lebih luas untuk mengurangi kesenjangan pendapatan, yaitu strategi yang mengoptimalkan kebijakan pemerintah yang berfokus pada keadilan sosial, memperkuat kebijakan distribusi, dan mempertimbangkan fungsi zakat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data panel pada 10 provinsi dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia selama periode 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa dinamika ketimpangan pendapatan

belum sepenuhnya dipengaruhi oleh variabel pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada periode pandemi hingga pascapandemi cenderung bersifat sektoral dan belum menyebar secara merata, sehingga peningkatannya tidak secara signifikan menurunkan ketimpangan pendapatan. Demikian pula, realisasi belanja pemerintah daerah belum mampu menjalankan fungsi redistribusi secara efektif, yang mengindikasikan bahwa peningkatan belanja belum diiringi dengan alokasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Sebaliknya, tingkat pendidikan jenjang SMA terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang menunjukkan bahwa ketidakmerataan akses dan kualitas pendidikan antarprovinsi berkontribusi terhadap perbedaan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan. Ketimpangan pendidikan tersebut berimplikasi pada perbedaan kualitas sumber daya manusia dan kesempatan kerja, sehingga memperkuat kesenjangan pendapatan antarwilayah. Selain itu, hasil pengujian simultan dan nilai koefisien determinasi yang relatif rendah menegaskan bahwa ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, dan pendidikan, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif. Dalam perspektif ekonomi Islam, temuan ini mengindikasikan bahwa upaya pembangunan ekonomi belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan distributif, di mana pertumbuhan dan belanja publik seharusnya memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pengurangan ketimpangan pendapatan memerlukan penguatan peran negara dalam pemerataan pendidikan, peningkatan efektivitas belanja publik, serta pengelolaan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial dan kemaslahatan umat.

Referensi

1. Agusalim, Lestari. 2021. "Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan Dan Desentralisasi Di Indonesia," 2021.
2. Aqilah, Muhamad Refkhi Al, Masruri Muchtar, and Pardomuan Robinson Sihombing. 2024. "Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Sumatera." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4 (1): 13–24. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.684>.
3. Chayyani, Nuri Resti. 2021. "Ketimpangan Pendapatan Dan Pemulihan Ekonomi Nasional." *The Indonesian Institute Center of Public Policy Research*, 1–25.
4. Deny Irawan, Baiq Saripta Wijumulawani, Muhamad Bai'ul Hak. 2024. "Investasi Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan" 6 (3): 623–33.
5. Fitriani, A. 2020. "Pendidikan, Kesehatan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Determinan Peningkatan IPM Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan Nasional* 8 (1): 33–45.
6. Gnangoin, Yobouet Thierry Bienvenu, Liangsheng Du, Guy Roland Assamoi, Akadje Jean Roland Edjoukou, and Diby François Kassi. 2019. "Public Spending, Income Inequality and Economic Growth in Asian Countries: A Panel GMM Approach." *Economies* 7 (4). <https://doi.org/10.3390/economies7040115>.
7. Hidayat, Rahmat, S Ag, and M Pd. 2019. *ILMU PENDIDIKAN*.
8. Hindun, ady Soejoto, Hariyati. 2019. "Pengaruh Pendidikan , Pengangguran , Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia" 8 (3): 250–65.
9. IRKANUDIN, NIRMALA. 2022. "Penaruh Pertumbuhan Ekoomi , Ketimpangan Pendapatan Dan Invetasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Selatan." 5 ٤٧٣٧ (8.5.2017): 5–2003.
10. Irsyadul Ibad Abdillah, and Novi Primitasari. 2023. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Indonesia Bagian Timur" 7 (03): 1–10.
11. Jailani, M Syahrani, and Firdaus Jeka. 2023. "Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis" 7: 26320–32.
12. Khodijah, Mardiah Kamila, and Muhammad Rizki Siddiq. 2022. "The Impact of Digital Economics on Economic Growth in Indonesia." *Fara'id and Wealth Management* 2 (1): 27–35. <https://doi.org/10.58968/fwm.v2i1.185>.
13. Lestari, Fuji, Fahrudin Zain Olilingo, and Herwin Mopangga. 2024. "Analisis Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Gorontalo Tahun 2018 – 2022." *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 13 (2): 306. <https://doi.org/10.35906/equili.v13i2.2003>.
14. mutia maharani, anas malik, taufiqur rahman. 2025. "Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Pengeluaran Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Pulau Jawa Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Muqayyad* 8 (1): 76–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.46963/jam.v8i1.2734>.
15. Sidauruk, Alvaro Deleon, Dwi Belcha Ananda, Eko Wahyu Nugrahadhi, Elsa Novri Regina, Intan Febyanti, and Syaila Azzahraini Siregar. 2024. "Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara Tahun 2014 - 2023." *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production* 2 (2): 450–59. <https://doi.org/10.57235/mantap.v2i2.2921>.
16. Soesana, Abigail, Hani Subakti, Salamun Salamun, Isnada Waris Tasrim, Karwanto Karwanto, Ilham Falani, Danny Philippe Bukidz, and Arsen Nahum Pasaribu. 2023. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*.
17. Ulfa, Nafisa Rinin, and Hidayat Wiweko. 2022. "E-Journal Field of Economics , Business , and Entrepreneurship (EFEBE)." *E-Journal Field of Economics, Business, and Entrepreneurship (EFEBE)* 1. <https://doi.org/10.23960/efebe.v3i3.263>.
18. yoga permana, fauzatul laily nisa. 2024. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 5 (February): 4–6.